

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KELANGSUNGAN PENDIDIKAN
ANAK USIA WAJIB BELAJAR**

**(KASUS KABUPATEN AGAM, KABUPATEN 50 KOTA,
DAN KABUPATEN TANAH DATAR)**

TESIS

Sipis...
Oleh

IRWANDI

99202017



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2002**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KELANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA WAJIB BELAJAR
(Kasus Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota,
Kabupaten Tanah Datar)**

Oleh : **IRWANDI**

(Dibawah Bimbingan Elfindri dan Rahmat Syahni)

RINGKASAN

Pemerintah telah memberlakukan Wajib Belajar semula 6 tahun dan diperpanjang menjadi 9 tahun. Hal ini adalah wujud nyata dari kebijaksanaan pemerintah di dalam memberikan kesempatan kepada anak usia 13-15 tahun untuk memperpanjang kesempatan memperoleh pendidikan. Namun kenyataannya Angka Partisipasi Murni belum mencapai target yang ideal untuk semua jejang pendidikan yang dilakukan di Indonesia selama ini adalah baru menggunakan pendekatan penawaran dalam bentuk sentralisasi pengelolaan pendidikan. Semua kebijaksanaan ditangani dan diatur oleh pemerintah pusat yang lebih berorientasi kepada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi kurang mempertimbangkan dari sisi permintaan, terutama sekali berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan orang tua dan masyarakat lokal. Akibatnya pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan tidak mengetahui dan memahami secara tepat apa dan seberapa besar kebutuhan masyarakat lokal terhadap layanan pendidikan.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak usia wajib belajar.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian di atas digunakan data SUSENAS tape 2000 yang menghimpun modul pendidikan dan dapat diolah guna menjelaskan anak usia 7-15 tahun dan 13-15 tahun kemungkinan bersekolah atau putus sekolah, yakni : 1), Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2), Status Anak Dalam Rumah Tangga, 3), Status Tempat Tinggal Anak, 4), Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan, 5), Anak Tinggal Bersama Siapa, 6), Pendidikan yang ditamatkan Orangtua.

Guna menemukan faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi keinginan orang tua di dalam membiayai pendidikan, alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik.

Hasil menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang dipelajari secara konsisten dan memperlihatkan pengaruh yang jelas kemungkinan anak usia 7-15 tahun sekolah atau putus sekolah adalah pendidikan yang ditamatkan orang tua dan status anak di dalam rumah tangga. Sedangkan untuk anak usia 13-15 tahun adalah pendidikan yang ditamatkan orang tua.

Implikasi dari hasil penelitian ini terutama dalam proses pembangunan pedesaan selanjutnya disarankan 1). Penanganan masalah wajib belajar 9 tahun ke depan perlu membedakan antara persoalan jenjang pendidikan SD (7-12 tahun) dengan SLTP (7-12 tahun) di dalam kaitan dengan keinginan orang tua membiayai pendidikan. 2), Ke depan perlu diperhatikan lebih khusus diberikan pada orang tua yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD dan Tamat SD, guna mengatasi putus sekolah, dengan cara meningkatkan bimbingan, arahan dan pengawasan yang lebih intensif kepada orang tua tersebut. Untuk itu dapat

dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat seperti Tokoh Adat, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, sehingga tanggung jawab wajib belajar tidak hanya semata-mata dibebankan kepada orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Model ini disarankan sebaiknya dilakukan di tingkat pedesaan karena masyarakatnya lebih homogen. 3), Mungkin perlu dibentuk di tingkat pedesaan berupa Komite Pendidikan Pedesaan, yang naggotanya terdiri dari tokoh masyarakat pedesaan guru, yang tugasnya memikirkan persoalan-persoalan pendidikan pada tingkat desanya. 4), Guna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat terutama bagi anak yang sudah putus sekolah yang sudah tidak mungkin lagi diajak ke sekolah formal, maka sebaiknya mereka didorong untuk belajar di sekolah-sekolah formal milik masyarakat pedesaan yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu sarana ibadah yang ada di pedesaan seperti mesjid, mushala dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana ibadah melainkan juga dapat digunakan sebagai kegiatan proses belajar mengajar.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya didalam diri setiap individu terdapat dua hal yang paling mendasar, yaitu keinginan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*). Setiap individu memiliki keinginan untuk maju, keinginan untuk berkembang kearah yang lebih baik, dan lain sebagainya. Akan tetapi tak jarang keinginan orang tersebut kadang terkendala oleh kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya adakalanya seseorang yang memiliki kemampuan, tapi tidak memiliki keinginan. Kondisi yang kedua ini merupakan bagian yang sulit untuk diperbaiki. Betapapun seseorang memiliki kemampuan, tapi jika tidak mempunyai keinginan maka semua kemampuan yang dimilikinya akan sia-sia saja. Tidak demikian halnya jika orang memiliki keinginan, namun tidak mempunyai kemampuan masih bisa didorong dengan memberikan *support* seperti yang diinginkan.

Gambaran seperti ungkapan diatas terjadi dalam proses pendidikan yang berlangsung di Indonesia hingga dewasa ini. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dapat dibantu/disubsidi oleh pemerintah dengan membangun atau menyediakan prasarana pendidikan yang tersebar hingga keseluruhan daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memajukan sumberdaya manusia sebagai generasi penerus yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Proses pendidikan sebagai wujud tekad pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa telah berlangsung lama di

Indonesia. Tekad tersebut telah banyak diiringi dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendukung setiap langkah dan upaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkualitas. Akan tetapi, kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di Indonesia selama ini baru didasarkan pada pendekatan penawaran melalui sentralisasi pengelolaan pendidikan (Elfindri, dkk : 2000). Dalam konteks yang demikian, semua kebijakan diatur oleh pemerintah pusat dan hanya berorientasi kepada penyediaan fasilitas, tetapi kurang mempertimbangkan dari sisi permintaan, terutama berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan keluarga, masyarakat lokal dari suatu daerah tertentu sebagai pengguna jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya, Pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan tidak mengetahui secara tepat berapa besar sebetulnya kebutuhan riil masyarakat terhadap permintaan jasa layanan pendidikan. Padahal keputusan terakhir ikut atau tidaknya keluarga atau masyarakat menikmati pendidikan sangatlah ditentukan oleh kemauan atau keinginan masyarakat untuk bersekolah, karena yang paling merasakan beban dan manfaat dari suatu jasa layanan pendidikan adalah si pengguna jasa pelayanan pendidikan itu sendiri. Orang bijak seperti Drucker (1978) juga pernah mengingatkan bahwa sekolah diadakan bukan untuk kepentingan pengajar, melainkan untuk kepentingan pelajar.

Menurut Harry dan David (1997), ekspansi secara besaran-besaran yang dilakukan pemerintah di dalam bidang pendidikan seperti membangun sekolah-sekolah, menyediakan guru belum memberikan manfaat terhadap keinginan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, banyak dari sekolah-sekolah yang

ditawarkan oleh pemerintah dan swasta lainnya kurang sesuai bagi anak-anak yang mempunyai latar belakang kehidupan tertentu. Namun, orang tua/masyarakat tidak memiliki banyak pilihan di dalam menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan keinginan anak mereka dan yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupannya. Kenyataannya mereka dituntut memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya atau lebih dekat dengan latar belakang kehidupannya (Coleman : 1992). Menurut Drucker (1978), pelanggan (pengguna jasa layanan pendidikan), hanya tertarik pada nilai-nilai yang berasal dari dia sendiri, keinginan dan kenyataan di sendiri.

Di pihak lain, sebagai wujud nyata dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak usia 13-15 tahun, Pemerintah telah melakukan Wajib belajar 6 tahun dan di perpanjang menjadi 9 tahun. Walaupun demikian, Angka Partisipasi Murni yang didapatkan belum mencapai target yang ideal untuk semua jenjang pendidikan. Menurut Elfindri (2000), Angka Partisipasi Murni yang ideal untuk 10 tahun ke depan adalah 100% untuk kelompok usia 7-15 tahun, 80% untuk usia 15-18 tahun, dan 25% untuk umur 19-24 tahun. Sedangkan Angka Partisipasi Murni baru mencapai 92,3% untuk Anak usia 7-12 tahun, 59.1% Anak usia 13-15 tahun, dan 38.5% anak Usia 16-18 tahun. Hal ini memberi gambaran bahwa masih ada sebagian anak usia sekolah yang tidak akses di dalam pendidikan. Jika dikuantifikasi sekitar 2 juta atau sekitar 7,4% anak usia 7-12 tahun, 5,8 juta atau sekitar 41,9% anak usia 13-15 anak yang tidak akses di pendidikan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari 6 variabel yang dipelajari secara konsisten yakni : 1) Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2) Status Anak Dalam Rumah Tangga, 3) Status Tempat Tinggal Anak, 4) Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Perbulan, 5) Anak Tinggal bersama siapa, 6) Pendidikan yang ditamatkan orang tua. Ternyata hanya 2 variabel yang memperlihatkan pengaruh yang jelas terhadap kekelangsungan pendidikan anak usia wajib belajar untuk anak usia 7-15 yaitu variabel pendidikan yang ditamatkan orang tua dan status anak di dalam rumah tangga. Sedangkan untuk anak usia 13-15 tahun, hanya 1 variabel yang memperlihatkan pengaruh yang jelas terhadap kelangsungan pendidikan anak usia wajib belajar yaitu variabel pendidikan yang ditamatkan orang tua. Jadi semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan orang tua, maka kemungkinan anak usia 7-15 untuk bersekolah adalah tinggi. Dan sebaliknya semakin rendah pendidikan yang ditamatkan orang tua, maka kemungkinan untuk putus sekolah adalah tinggi.
2. Kerawanan putus sekolah pada anak usia 7-15 tahun terjadi pada anak yang tingkat pendidikan orang tuanya adalah tidak tamat SD dan tamat SD serta status anak di dalam rumah tangga bukan diasuh oleh ibu dan bapak

kandung. Sedangkan pada kelompok usia 13-15 tahun, putus sekolah besar kemungkinan terjadi pada anak yang dibimbing dan diasuh oleh orang tua yang tidak tamat SD dan tamat SD

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanganan masalah wajib belajar 9 tahun ke depan perlu dibedakan antara persoalan SD (7-12 tahun) dengan SLTP (7-12) di dalam kaitan dengan keinginan orang tua membiayai pendidikan.
2. Ke depan perlu diperhatikan lebih khusus diberikan pada orang tua yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD dan Tamat SD, guna mengatasi putus sekolah, dengan cara meningkatkan bimbingan, arahan dan pengawasan yang lebih intensif kepada orang tua tersebut. Untuk itu dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat seperti Tokoh Adat, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, sehingga tanggung jawab wajib belajar tidak hanya semata-mata dibebankan kepada orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Model ini disarankan sebaiknya dilakukan di tingkat pedesaan karena masyarakatnya lebih homogen.
3. Mungkin perlu dibentuk di tingkat pedesaan berupa Komite Pendidikan Pedesaan, yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat pedesaan dan guru. Yang tugasnya memikirkan persoalan-persoalan pendidikan pada tingkat desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ngurah Gusti, I. 2001. Statistik, Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Katagorik. PT Raja Garfindo. Jakarta.
- Asnawi, Syofian dan Teken I.B. 1977. Teori Ekonomi Mikro. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Bejo, Sutejo. 1997, Persepsi Masyarakat tentang pendidikan (Studi Kasus di Desa Miskin) Tesis Program Pasca Sarjana IKIP. Padang.
- Bintoro. Tjokroamidjoyo dan Mustopadijaya. 1980 A.R. Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta
- Biro Pusat Statistik, 1999, Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, Padang. BPS Sumatera Barat..
- Biro Pusat Statistik, 1999, Agam Dalam Angka 1999
- Biro Pusat Statistik, 1999, 50 Kota Dalam Angka 1999.
- Biro Pusat Statistik, 1999, Tanah Datar Dalam Angka 1999.
- Biro Pusat Statistik, 2000, Statistik Indonesia 2000
- 1999, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, BPS. Indonesia.
- 1999, Statistik Lingkungan Hidup, Jakarta. BPS Indonesia.
- Cameron, Lisa A. 2001, The Impact of Indonesia Financial Crisis on Children: An Analysis Using 100 Vilage Data, Bulletin Indonesian Economic Studies.
- Coleman, James S. 1992, Some Points on Choice in Education, Sociology of Education.
- Coombs. 1973 PH The World Educational Crisis, A System Analysis. London, Oxford University Press.
- Daniel, Wayne, 1989, Staistik Non Parametrik (seri terjemahan), Gramedi, Jakarta

